

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini marak sekali orang Indonesia membahas kasus LGBT. LGBT itu sendiri adalah singkatan dari *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual* dan *Trans Gender*. Dalam hal ini *Lesbian* dan *Gay* adalah termasuk bagian dari homoseksual.

Perilaku homoseksual adalah tindakan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis kelamin. Jika sesama pria homoseksual disebut dengan *gay*, dan jika sesama wanita disebut *lesbian*. Dan cara untuk menyalurkan hasrat *seks* juga bermacam-macam sesuai dengan keinginan pasangan tersebut. Secara fisik, bisa melalui dubur bagi pria atau *Liwath*, merangsang bagian-bagian sensitif bagi wanita, atau menekan bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian sensitif bagi pasangan homoseksnya.

Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau antara individu berjenis kelamin sama. Hingga kini orang belum mengerti sepenuhnya mengetahui tentang hal ini. Akan tetapi ternyata homoseksual terdapat dalam banyak masyarakat dan masih dianggap sebagai aib dan ancaman, walaupun tidak merugikan orang lain. Pada umumnya itu terjadi selama masa remaja dan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria daripada kaum wanita.¹

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku homoseksual ini biasanya secara psikologis pelakunya memainkan peran layaknya membina kehidupan berumah

¹ Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan: CV. Bahagia, 200).

tangga dengan salah satu pelaku yang lebih dominan berperan sebagai laki-laki (suami) dan salah satunya berperan sebagai perempuan (istri), sehingga tetap ada peran yang berbeda antara keduanya. Hal tersebut dapat terjadi dalam hubungan sesama jenis baik itu sesama perempuan maupun sesama laki-laki.

Perkembangan hak asasi manusia telah menitik beratkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di dunia, merupakan perbuatan yang wajar. Berbagai masalah yang berkenaan dengan “*behavior inrelationto sexual matter*” yang sedang dalam proses penilaian masyarakat, khususnya mengenai kelainan-kelainan yang dialami seseorang antara lain adalah perilaku homoseksual, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.²

Dimanapun di seluruh dunia, hampir seluruh sistem sosial menolak kehidupan homoseksual. Di antara 204 Negara di dunia ini homoseksual dianggap *illegal* di 74 Negara. Kebanyakan Negara dimana perilaku homoseksual dianggap *illegal* ternyata kultur yang dominan adalah Islam, atau bekas Negara-negara komunis ataupun bekas koloni-koloni Inggris.³ Di Bahrain atau Bangladesh homoseksual di anggap *illegal*, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Di Irak Undang-Undangnya juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 14 tahun penjara. Di Kuba homoseksual dihukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. Di Spirus mereka bisa di hukum maksimal 5 tahun penjara. Di Pakistan pelaku homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

³ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

Namun di beberapa negara terdapat beberapa fenomena yang unik. Hukum melegalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, secara sosial sudah menjadi urusan yang privat dan tak perlu diributkan bahkan bentuk-bentuk pengakuan sosial tersebut dapat dilihat seperti klub-klub *gay*, perkumpulan-perkumpulan khusus untuk kaum homoseksual, dimana hukum yang berlaku bersifat “*sekuler*” terhadap urusan tersebut.

Di Amerika misalnya, hanya negara bagian seperti Arkansas, Kansas, Oklahoma, Texas, Montana dan Nevada yang menganggap homoseksual sebagai pelanggaran hukum, sementara negara bagian lainnya melegalkan perilaku tersebut. Menurut Bales, antara tahun 1969 sampai tahun 1979 menunjukkan kenaikan 245% pelacuran laki-laki remaja. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antara 300-600 ribu pelacur pria di seluruh Amerika Serikat.⁴

Dipandang dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkan timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Pada tahun 1979, penyakit ini baru diketahui. Pusat pemantau penyakit yang berada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat melaporkan ada satu penyakit aneh menimpa pada lima pemuda. Penyakit itu adalah *Pneumo Cystis Carini Pheumonia*, yang mengherankan kelima pemuda itu semuanya pelaku homoseksual. Dr. Martin, seorang anggota panitia khusus yang dibentuk UNISCO di tahun 1969 untuk meneliti penyakit seksual yang disebabkan oleh kelainan seks, menyatakan bahwa penyebab utama penyakit *syphilish* dan *gonorhea* adalah homoseksual. Di lain

⁴ Sarlito Wiirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).

pihak, 65% penyakit *syphilis* yang terjadi pada kurun waktu 1960-1962 di London disebabkan homoseksual.⁵

Dari semua agama yang ada di dunia, hampir seluruhnya tidak sepakat dengan perilaku homoseksual ini. Islam sebagai agama yang turun sebagai tuntunan yang baik bagi umat manusia dimana pada fitrahnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan tujuan untuk mencapai kedamaian, menghindari zina, meneruskan keturunan dan memelihara akal. Adapun ayat Al-Qur'an yang melarang hubungan sesama jenis, yaitu QS *al-A'raf* (7): 80-81 dan QS *Hud* (11): 82-83 :

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُجْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? (80) Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (81)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّتَّضُودٍ ۚ ٨٢ مُّسَوِّمَةً ۚ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ۚ ٨٣

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (82) Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim (83)

Sementara dalam hukum positif Indonesia, ketentuan yang tegas mengenai pengaturan perilaku homoseksual terdapat dalam ketentuan pidana pasal 292

⁵ Jaslim bin Muhammad bin Muhalhil Al Yasin, *Seks Islami*, (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2006).

KUHP dengan ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara. Bunyi pasal 292 secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa itu, dipenjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Ancaman hukuman bagi pelaku homoseksual menurut hukum positif hanya berlaku bagi orang yang berusia dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Dua orang yang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini, oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa.⁶ Dengan demikian dapat dikatakan pengaturan mengenai perilaku homoseksual di Indonesia belum bersifat menyeluruh, masih terbatas pada perilaku yang bersifat paksaan cabul dan terbatas pada korban yang masih belum dewasa.

Sementara itu, jika dilihat dari aspek nilai-nilai pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Indonesia yang sangat menjunjung tinggi norma hukum dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka norma agama yang terkandung dalam dasar hukum tersebut harus dijunjung tinggi. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya yang baik sebagai upaya untuk membangun manusia yang lebih beradab. Nilai-nilai dalam norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia baik itu norma agama,

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1991).

norma susila, norma sosial maupun norma adat, itu sendiri dapat dikembangkan juga dapat menjadi rujukan sumber hukum positif Indonesia.⁷ Dengan menggali nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia maka dimungkinkan untuk dilakukan pengaturan yang lebih jelas mengenai perilaku homoseksual.

Jika dilihat dari nilai-nilai moralitas yang hidup di Indonesia secara umum hubungan sesama jenis tersebut jelas sangat bertentangan, apalagi jika hubungan sesama jenis tersebut sampai terlembagakan layaknya sebuah pernikahan.

Norma hukum sebagai produk otoritas negara Indonesia bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, untuk ketentraman, untuk mencapai ketenangan masyarakat dan menciptakan keterbiban hidup. Hal tersebut terkait pula dengan pola proses interaksi antara kehidupan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain atau pribadi dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain.⁸ Dengan demikian maka diperlukan suatu formulasi dalam pengaturan perilaku homoseksual di Indonesia dengan menggali nilai-nilai dasar dari sumber hukum pidana Islam untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang mengakui eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar bernegara.

Hukum, sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku yang pada saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif merupakan produk buatan manusia dan bahkan ada yang merupakan produk

⁷ M. H. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)

hukum warisan kolonial contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan. Produk hukum tersebut pada dasarnya adalah buatan manusia yang sudah tentu memiliki banyak kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya atau proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum khususnya seringkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai paramater yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist⁹. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak¹⁰. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT tersebut. Perintah Allah SWT yang dimaksud, harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain. Berbeda dengan hukum pidana positif yang nyata-nyata buatan manusia. Karena produk hukum tersebut merupakan olahan pikiran dari manusia,

⁹ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, 20007. Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

¹⁰ Ibid

pastilah mempunyai kekurangan maupun celah-celah sehingga manusia dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila berbicara mengenai hukum pidana, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam. Cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum tertentu seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha Negara, hukum pertanahan dan sebagainya. Sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al Qur'an, Hadist, maupun Ijtihad para ulama. Ketentuan-ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah, yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak.

Berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana

Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya¹¹. Namun jika melihat cakupan yang lebih luas lagi, maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Menurut Abu Ishq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syari'ah (tujuan hukum Islam)¹². Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadist.

Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hukum Pidana Islam

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, 2005. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hal ix.

¹² Muhammad Daud Ali, 1990, Hukum Islam, Jakarta; Penerbit Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, hal. 61

merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat.¹³

Hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan- pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum pidana pelaku homoseksual menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

¹³ Zainudin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, hal 1

2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi hukum pidana pelaku homoseksual menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memberikan deskripsi dan analisis yuridis mengenai sanksi hukum pidana pelaku homoseksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- b. Menjabarkan perbedaan dan persamaan sanksi hukum pidana pelaku homoseksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkap segi-segi persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang perilaku homoseksual diharap berguna:

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dalam memandang perilaku homoseksual sekaligus dalam rangkaian mengembangkan wawasan studi hukum melalui hukum Islam sebagai sumber hukum.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan serta pembahasan lebih lanjut seputar kajian perilaku homoseksual.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum nasional, khususnya dalam merumuskan pengaturan mengenai perilaku homoseksual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh melalui penelitian buku yang berhubungan dengan persoalan perilaku homoseksual baik dalam pandangan Hukum Pidana Islam maupun hukum positif Indonesia.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis data penelitian kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi pendalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji yang datanya diperoleh dari hasil study literatur atau kepustakaan tentang objek sesuai dengan perumusan masalah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pertama sumber data primer yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber hukum yang mengikat sebagaimana Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua sumber data sekunder yang diambil dari beberapa sumber yang erat hubungannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta membantu untuk memahami sumber hukum primer, yang

terdiri dari berbagai buku bacaan, laporan penelitian, jurnal, majalah, makalah dan lain-lainnya yang masih berkaitan. Ketiga sumber data tersier yang diambil dari sumber-sumber yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

3. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif yaitu menyusun berusaha mendeskripsikan sanksi homoseksual dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan perilaku homoseksual dalam pandangan hukum positif Indonesia, kemudian menganalisis dan mengkomparasikan antara kedua pandangan hukum tersebut.

4. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok masalah yang hendak dikaji. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang diambil dari sumber hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian diuraikan secara sistematis dan dianalisis sanksi pidana terhadap pelaku homoseksual tersebut menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu penalaran yang berawal dari data-data maupun konsep mengenai prinsip-prinsip umum tentang perilaku homoseksual dalam

pandangan hukum Islam dan juga menurut pandangan hukum positif Indonesia, penyusun akan berusaha untuk menganalisa dan merumuskannya secara lebih spesifik bagaimana sanksi pidana pelaku homoseksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

- b. Komparatif yaitu suatu cara berfikir dengan menempatkan data dalam suatu perbandingan yang sepadan sehingga diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan secara spesifik, juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan hukum tersebut terhadap perilaku homoseksual.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, guna membahas skripsi ini penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pembedaan menurut KUHP dan hukum pidana islam, teori tujuan pembedaan dan homoseksual menurut KUHP dan hukum pidana islam sebagai kejahatan.

Bab Ketiga yang merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu menjabarkan tentang sanksi hukum pidana pelaku homoseksual menurut KUHP dan hukum pidana islam dan menjelaskan juga tentang persamaan dan perbedaan

sanksi hukum pidana islam terhadap pelaku homoseksual menurut KUHP dan hukum pidana islam.

Bab Keempat berupa tentang kesimpulan akhir dan saran-saran yang dapat diambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya kebaikan skripsi ini.

